

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan

Wibawa (2017:70) menyampaikan bahwa manajemen memiliki fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang mencakup penentuan peranan dan fokus operasi pendidikan.sekolah atau organisasi pendidikan dapat mencapai visinya dalam mendidik siswa. Oleh karena itu manajemen merupakan instrumen organisasi atau satuan pendidikan untuk mencapai tujuan. Nickels (1997) menyatakan “*Educational management is process undertaken to achieve organizational education goals through a series of activities such as planning, organizing, directing, and controlling people and other organizational resources*” Manajemen pendidikan adalah proses kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi pendidikan, melalui kegiatan yang berkesinambungan yaitu, perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian orang-orang dan sumber daya lain dalam organisasi.

Tilaar (2001) menyatakan bahwa “*Management education is a whole process of joint activities in education that includes planning, organizing, directing, reporting, coordination, supervision and financing, using or utilizing the facilities available, good personnel, material, or spiritual to achieve educational goals effectively and efficiently*”. Manajemen pendidikan adalah keseluruhan proses kerjasama dalam organisasi pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, supervisi dan pembiayaan dengan menggunakan berbagai fasilitas, personil yang baik, material dan spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pengertian tentang manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Seperti telah dikemukakan proses pengelolaan yang baik menggunakan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Organisasi yang dikelola adalah organisasi pendidikan. Sumber daya pendidikan yang dikelola adalah yang tercantum dalam standar nasional pendidikan, yaitu kurikulum (standar isi), proses pembelajaran, ketenagaan (pendidik dan tenaga kependidikan), sarana dan prasarana, pengelolaan, penilaian dan kompetensi lulusan.

Manajemen pendidikan yang professional, tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif berarti manajemen pendidikan mengerjakan pekerjaan yang benar (sesuai standar) sehingga tujuan pendidikan tercapai pada gradasi yang tinggi. Efisien berarti mengerjakan pekerjaan dengan cara yang benar, sehingga dapat sumber daya digunakan secara optimal. Bila fungsi manajemen ditunjukkan dalam pengertian manajemen, maka manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian (pengelolaan) sumber daya manusia dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Menurut Sugiyono (2016) Manajemen pendidikan kejuruan adalah Kegiatan manajemen yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen secara konsisten dan berkelanjutan didasarkan pada dalil pendidikan kejuruan untuk mengelola standar nasional pendidikan. Manajemen pendidikan ditekankan pada pengembangan kurikulum yang relevan, menyelenggarakan pembelajaran berbasis teaching factory dan industry, pembiayaan yang mencukupi untuk pengadaan sarpras khususnya untuk alat dan bahan praktik bengkel, guru profesional yang memiliki

kompetensi, kepala sekolah yang mampu menerapkan instructional leadership, transformational leadership (memberdayakan guru dan karyawan) dan mampu membangun jaringan kerja, dan perlu dilaksanakannya Sistem Pengendalian Manajemen (Management Control System).

Wiesner dan Nurhening (2018:162) menyatakan “*Vocational education designed to develop (enhance and empower) graduates, which are competent for work*”. Husaini (2012:6) menyatakan pendidikan kejuruan adalah pendidikan vokasional yang memiliki tujuan menyiapkan lulusan sebagai tenaga kerja sesuai bidang yang difokuskan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pendidikan kejuruan didesain untuk mengembangkan lulusan yang kompeten untuk bekerja.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa pada hakikatnya siswa belajar disekolah kejuruan disiapkan agar nantinya mampu dan mau bekerja sesuai dengan bidang kejuruan yang dipelajarinya semasa sekolah. Unsur tujuan ini menjadi unsur utama yang perlu ditetapkan dalam sistem pendidikan kejuruan dan vokasi. Kejelasan dari unsur tersebut akan memberikan arah dan fokus dalam pencapaian tujuan yang berujung dengan efektif dan efisiennya pengelolaan pendidikan teknologi dan kejuruan.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional pada jenjang menengah yang lebih mengutamakan pengembangan kemampuan dan menguasai di bidang keahlian tertentu kepada peserta didik, sehingga nantinya diharapkan peserta didik dapat bekerja di dunia usaha atau dunia industri sesuai bidang keahlian yang dipelajari. Hal ini yang mempengaruhi kelulusan dan kualitas selama siswa ada dalam masa pendidikan yang ada di SMK. Kelulusan dan kualitas siswa yang dimiliki tergantung dari

manajemen sekolah itu sendiri yang digunakan dan dikelola, sekolah mempunyai peran penting dalam ini. Manajemen Berbasis sekolah memberikan inovasi dan keluasaan kepada pihak sekolah untuk mengembangkan dan menginovasi agar lulusan mempunyai kriteria yang diharapkan dengan berprinsip pada manajemen berbasis sekolah.

2. Manajemen Berbasis Sekolah

a. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah atau biasa disebut MBS Menurut Minarti (2012:50), Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara bahasa berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat untuk menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan penjelasan tersebut, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah dalam proses pembelajaran. Minarti (2012:49), mengartikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai pengorganisasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (partisipatif).

Manajemen Berbasis Sekolah sebagai terjemahan dari *School Based Management* (SBM) adalah suatu pendekatan praktis yang bertujuan untuk mendesain pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja

sekolah yang mencakup kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa dan masyarakat (Fattah, 2012:42).

Suparlan (2013:49) mendefinisikan MBS sebagai satu strategi untuk meningkatkan sekolah dengan menyerahkan otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari negara dan Kabupaten kepada satuan pendidikan secara individual. MBS menyediakan para kepala sekolah, guru-guru, para siswa, dan para orang tua siswa untuk melakukan pengawasan secara lebih besar terhadap proses pendidikan dengan memberikan tanggung jawab untuk pengambilan anggaran, personel dan kurikulum.

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan satu strategi wajib yang ditetapkan sebagai standar dalam mengembangkan keunggulan pengelolaan sekolah. Penegasan ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 51 ayat 1 bahwa pengelolaan satuan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Depdiknas (2007:12) secara umum, MBS dapat di artikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

MBS merupakan suatu strategi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang menekankan pada penerahan dan pendayagunaan sumber internal sekolah dan lingkungannya secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bermutu. Dengan kata lain, implementasi MBS disatuan pendidikan sekolah sesungguhnya terkait dengan bagaimana proses

penentuan kebijakan sekolah harus ditetapkan oleh sekolah untuk memberikan output yang baik.

b. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

Minarti (2012:69) mengatakan tujuan umum Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah dan mendorong partisipasi warga sekolah dan mendorong partisipasi warga sekolah serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Tujuan implementasi MBS adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, baik itu menyangkut kualitas pembelajaran, kualitas kurikulum, kualitas sumber daya manusia, guru maupun tenaga kependidikan lainnya, dan kualitas pendidikan secara umum. Bagi sumber daya manusia, peningkatan kualitas bukan hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, melainkan kesejahteraannya pula.

Tujuan implementasi MBS adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Mulyono (2009:244) Implementasi MBS memiliki tujuan meningkatkan mutu, kepedulian, tanggungjawab, kompetensi hal tersebut dapat dijelaskan antara lain:

- 1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
- 2) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.

- 3) Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya.
- 4) Meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

MBS bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan MBS, sekolah diharapkan makin berdaya dalam mengurus dan mengatur sekolahnya dengan tetap berpegang pada koridor-koridor kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas, 2007:16)

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah peningkatan mutu pendidikan, yaitu dengan memandirikan sekolah untuk mengelola lembaga bersama pihak-pihak terkait (guru, siswa, masyarakat, wali murid, dan instansi lain) sehingga sekolah dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu instruksi dari atas dalam mengambil langkah-langkah untuk memajukan pendidikan. Mereka dapat mengembangkan suatu visi pendidikan sesuai dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi tersebut secara mandiri.

c. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah

Karakteristik MBS dapat diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerjanya, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem administrasi secara keseluruhan. MBS akan efektif jika memiliki sejumlah karakteristik antara lain: Input, proses dan output, hal ini tentunya terlepas dari karakter sekolah yang efektif yang mana sekolah yang efektif adalah sekolah yang memiliki hasil guna melalui input, proses dan output. Didalamnya dijumpai manajemen dan

kepemimpinan yang mampu mengarahkan sumber daya sekolah untuk kepentingan tujuan sekolah, ada kepuasan kerja para personil dan lulusan yang berkualitas serta mengarahkan perubahan sekolah secara antisipatif dan produktif.

Sagala (2009:94-95) mengatakan bahwa MBS akan efektif jika memiliki output, kebutuhan, kemandirian dan kemitraan, karakteristik dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Memiliki output (prestasi pembelajaran dan manajemen sekolah yang efektif) yang diharapkan oleh visi dan misi.
- 2) Analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kerja, hubungan kerja dan imbal jasa tenaga kependidikan dan guru yang memenuhi kebutuhan nafkah hidupnya, sehingga mereka mampu menjalankan tugas dengan baik.
- 3) Kemandirian, menggambarkan otonomi manajemen sekolah yang efektif dan layanan belajar yang bermutu, menggunakan evaluasi hasil belajar standar, dan prestasi pembelajaran.
- 4) Kemitraan, yang memanfaatkan potensi pemangku kepentingan sekolah dan masyarakat dan Partisipasi, Keterbukaan, serta Akuntabilitas

Sejalan dengan itu, Saud (2009) berdasarkan pelaksanaan di negara maju mengemukakan bahwa "Karakteristik dasar MBS adalah pemberian otonomi yang luas kepada sekolah, partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional, serta adanya team work yang tinggi dan profesional". Untuk penjabarannya adalah sebagai berikut:

1) Pemberian otonomi luas kepada kepala sekolah

MBS memberikan otonomi yang luas kepada kepala sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih memberdayakan tenaga kependidikan guru agar lebih berkonsentrasi pada tugas utamanya mengajar. Di samping itu, sekolah diberikan kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan program program kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat.

2) Partisipasi masyarakat dan orang tua

Pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah.

3) Kepemimpinan yang demokratis dan profesional

Pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh adanya kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana inti program sekolah merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas profesional. Kepala sekolah adalah manajer pendidikan profesional yang direkrut oleh komite sekolah untuk mengelola segala kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Guru-guru yang direkrut oleh sekolah adalah pendidik profesional dalam bidangnya masing-masing, sehingga mereka bekerja berdasarkan pola kinerja profesional yang disepakati bersama untuk memberikan kemudahan dan mendukung keberhasilan

pembelajaran peserta didik. Dalam proses pengambilan keputusan, kepala sekolah mengimplementasikan proses "*bottom up*" secara demokratis, sehingga semua pihak memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil beserta pelaksanaannya.

4) Team-work kompak dan transparan

Keberhasilan program-program sekolah didukung oleh kinerja teamwork yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di sekolah. Dalam dewan pendidikan dan komite sekolah misalnya, pihak-pihak yang terlibat bekerja sama secara harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing untuk mewujudkan suatu "sekolah yang dapat dibanggakan" oleh semua pihak.

3. Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah

Mutu pendidikan merupakan konsekuensi langsung dari satu perubahan dan perkembangan berbagai aspek kehidupan. Tuntutan terhadap mutu pendidikan tersebut menjadi syarat terpenting untuk dapat menjawab tantangan perubahan dan perkembangan itu (Kusuma, dkk, 2016). Pembentukan suatu kebijakan tidak akan lepas dari prinsip dan dasar yang digunakan, dimana dasar dan prinsip tersebut akan menjadi landasan untuk menguatkan suatu kebijakan agar dapat terealisasi dengan baik dan benar. Kebijakan pemerintah yang mengenai Manajemen Berbasis Sekolah juga sejalan dengan Permen Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang memiliki penopang untuk menguatkan dasar kebijakan agar kebijakan pemerintah tersebut dapat terealisasi dengan baik.

Sebagai tujuan yang mendukung Manajemen Berbasis Sekolah memiliki tujuh pilar Triwiyanto (2015), yaitu kurikulum dan pembelajaran, peserta didik

pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, hubungan sekolah dan masyarakat, dan budaya dan lingkungan sekolah dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah

Manajemen kurikulum dan Pembelajaran berbasis sekolah mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kurikulum. Pengembangan kurikulum sudah dilakukan oleh Depdiknas di tingkat pusat, dan sekolah mengatur bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Selain itu sekolah juga berwenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan setempat.

Suharno (2008:53) Kurikulum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat adalah kurikulum standar yang berlaku secara nasional (standar isi), padahal kondisi sekolah pada umumnya sangat beragam. Oleh karena itu, dalam implementasinya, sekolah dapat mengembangkan (memperdalam, memperkaya, memodifikasi), namun tidak boleh mengurangi standar isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Selain itu, sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.

Sekolah sebenarnya dapat dikatakan belum cukup siap untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum secara benar. Evaluasi kesiapan Sekolah dalam mengemban kurikulum dan perbaikan dengan cara lain memberikan inovasi akan memberikan kurikulum yang lebih baik (Manap, 2009). Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah adalah pengaturan kurikulum dan pembelajaran yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum dan

pembelajaran di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip- prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.

2. Manajemen peserta didik berbasis sekolah

Manajemen peserta didik adalah pengaturan peserta didik yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan peserta didik di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.

Mulyasa (2007:40) Manajemen kesiswaan bukan semata-mata hanya aspek pencatatan data siswa, namun juga aspek operasional yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, bidang kesiswaan memiliki tiga tugas pokok, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar serta bimbingan dan pembinaan disiplin.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa sekolah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik yang meliputi kriteria calon peserta didik, tata cara penerimaan peserta didik di sekolah, dan orientasi peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru di sekolah dilakukan sesuai ketentuan objektif, tanpa diskriminasi, kapasitas, sesuai penjelasan sebagai berikut:

- 1) secara obyektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam aturan sekolah.
- 2) tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi bagi Sekolah penerima subsidi dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

3) sesuai dengan daya tampung sekolah.

3. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan berbasis sekolah

Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah pengaturan pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan yang terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.

Mulyasa (2007:40) Mengatakan keberhasilan MBS sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya dalam mengelola tenaga pendidikan yang tersedia di sekolah. Manajemen Personalia mencakup: Perencanaan pegawai, Pengadaan pegawai, Pembinaan dan pengembangan pegawai, Promosi dan mutasi Pemberhentian pegawai, Kompensasi dan Penilaian pegawai.

4. Manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah

Manajemen sarana dan prasarana adalah pengaturan sarana dan prasarana yang meliputi kegiatan Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi dan penghapusan serta penataan dan mengevaluasi program kegiatan sarana dan prasarana di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah. Mulyasa (2007:41) Manajemen sarana dan prasarana ini diharapkan dapat menciptakan sekolah yang lebih bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah.

5. Manajemen pembiayaan berbasis sekolah

Manajemen pembiayaan adalah pengaturan pembiayaan yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi

program kegiatan pembiayaan di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.

Mulyasa (2007:44) Pembiayaan merupakan sumberdaya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Manajemen sekolah ini berkaitan dengan kemampuan sekolah untuk melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Sumber pendanaan pendidikan adalah pemerintah, orang tua dan masyarakat.

6. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat berbasis sekolah

Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat adalah pengaturan hubungan sekolah dan masyarakat yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.

Mulyasa (2007:48) Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakekatnya merupakan satu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien.

7. Manajemen budaya dan lingkungan berbasis sekolah

Manajemen budaya dan lingkungan adalah pengaturan budaya dan lingkungan yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan budaya dan lingkungan

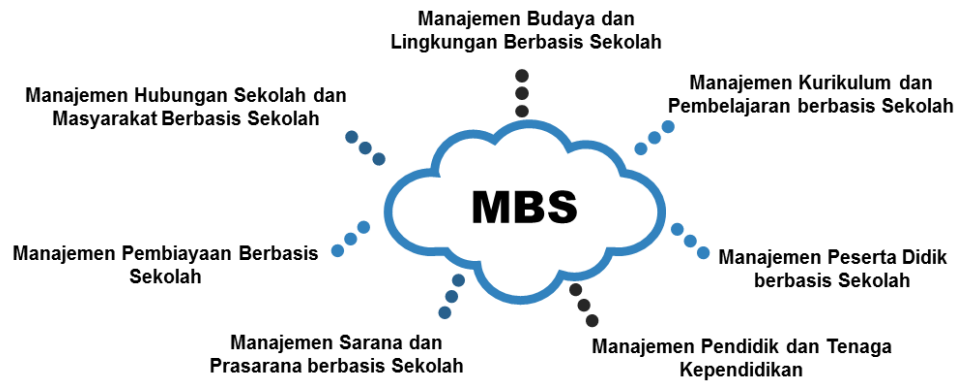
sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.

Sekolah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan. Prosedur pelaksanaan penciptaan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan hal tersebut sesuai penjelasan berikut:

- 1) Prosedur tertulis mengenai informasi kegiatan penting minimum yang akan dilaksanakan
- 2) Memuat judul, tujuan, lingkup, tanggung jawab dan wewenang serta penjelasannya
- 3) Diputuskan oleh kepala sekolah dalam rapat dewan pendidik.

Sekolah menetapkan pedoman tata-tertib yang berisi: tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk dalam hal menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan, dan petunjuk, peringatan, dan larangan dalam berperilaku di Sekolah, serta pemberian sanksi bagi warga yang melanggar tata tertib.

Suharno (2008:57) Budaya dan lingkungan (fisik dan nonfisik) yang kondusif-akademik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa adalah contoh-contoh iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa.



Gambar 1. Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Uraian gambar telah menyimpulkan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menerapkan MBS yakni kekuatan komitmen yang dimiliki kepala sekolah dan guru, kesiapan sumber daya sekolah, adanya keterlibatan dan kesadaran seluruh warga sekolah sehingga sekolah dapat memiliki otoritas dan kemandirian dalam mengelola sekolah, sekolah memiliki ketahanan dalam menyesuaikan perubahan. Lebih jauh di dalam bukunya *Administrasi Pendidikan*, (Engkoswara, 2012) menjelaskan bahwasanya MBS dapat dilaksanakan dengan menjalankan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, wawasan dan *Sharing Authority* penjelasan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Partisipasi: Partisipasi penting untuk meningkatkan rasa memiliki, peningkatan rasa memiliki akan meningkatkan rasa tanggung jawab, dan peningkatan tanggung jawab akan meningkatkan dedikasi atau kontribusi. Partisipasi adalah proses dimana stakeholders terlibat aktif baik dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pengevaluasian pendidik di sekolah.
2. Transparansi: manajemen sekolah dilaksanakan secara transparan, mudah diakses anggota, manajemen memberikan laporan secara kontinu sehingga stakeholders dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Manajemen pendidikan yang transparan memungkinkan

tumbuhnya kepercayaan dan keyakinan stakeholders terhadap kewibawaan dan citra sekolah yang good goverment dan clean governance.

3. Akuntabilitas: Sekolah harus mempertanggung jawabkan aktivitas penyelenggaraan sekolah yang telah dimandatkan stakeholders dengan melakukan manajemen sebaik mungkin.

4. Profesionalisme: mencapai kemandirian dengan tingkat prakarsa dan kreativitas yang tinggi memerlukan profesionalisme dari semua komponen personil, baik jajaran manajemen, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, maupun komite sekolah.

5. Memiliki wawasan ke depan berupa visi, misi dan strategi ke arah pencapaian mutu pendidikan.

6. *Sharing Authority* dalam implementasi manajemen, tidak *one manshow* tetapi berpijak pada kekuatan kerja tim yang solid.

Uraian di atas adalah prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah dapat dijelaskan bahwa dalam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah harus berpegang pada prinsip-prinsip MBS yang meliputi: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, wawasan ke depan dan *sharing authority*. Pelaksanaan MBS yang efektif akan mudah dilaksanakan jika seluruh elemen sekolah ikut berpartisipasi aktif dalam mengelola sumber daya sekolah ataupun program sekolah. Sekolah juga harus memiliki tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam melakukan kegiatan manajemen sekolah. Sistem manajemen sekolah yang akuntabel dan transparan akan berdampak positif bagi sekolah dalam mengelola sumber daya sekolah.

Sekolah yang menerapkan MBS harus memiliki visi, misi dan tujuan yang akan dicapai. Pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut dilakukan untuk

mengarahkan sekolah dalam mencapai mutu pendidikan. MBS juga menekankan pada kerja sama yang solid antara kepala sekolah dengan warga sekolah lainnya yang meliputi guru, staff atau karyawan, peserta didik dan orang tua. Dengan saling bekerja sama antar warga sekolah tentu pelaksanaan MBS akan berjalan dengan optimal dan terarah.

4. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Penerapan manajemen berbasis sekolah akan berpengaruh berbeda dalam setiap sekolah maka Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2011:191) mengemukakan implementasi MBS sebagai berikut:

a. Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah

Kurikulum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat adalah kurikulum yang standar yang berlaku secara nasional. Padahal kondisi sekolah pada umumnya sangat beragam. Oleh karena itu, dalam implementasinya, sekolah dapat mengembangkan (memperdalam, memperkaya, memodifikasi), namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Selain itu, sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.

Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah meliputi kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan kurikulum dan evaluasi kurikulum dalam sekolah. Kegiatan yang berhubungan dengan manajemen kurikulum meliputi:

1. Pengelolaan kurikulum yang dijabarkan dari struktur program pengajaran dan ketentuan tentang beban mengajar wajib bagi guru. Antara lain Tugas guru dalam mengelola kelas yaitu: Penyusunan dan mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan sekolah dan prosedur yang sesuai, Jadwal pelajaran dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan akademik, Keseimbangan berat ringan bobot pelajaran tiap hari, Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan prosedur.

2. Evaluasi kurikulum dan pembelajaran, disusun sesuai situasi dan kondisi individual atau kelompok peserta didik. Evaluasi diperlukan guna mencari kelemahan dan kelebihan dalam setiap pembelajaran yang berguna mengarahkan pesertadidik untuk menemukan cara yang ideal.

Tugas manajemen kurikulum berbasis sekolah dalam kegiatan proses belajar mengajar diantaranya membuat persiapan atau perencanaan pengajaran, melaksanakan pengajaran dan mengevaluasi hasil pengajaran.

b. Manajemen peserta didik berbasis sekolah

Pelayanan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja, sehingga sampai pada pengurusan alumni, sebenarnya dari dahulu memang sudah didesentralisasikan. Karena itu, yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya. Manajemen peserta didik menunjuk pada kegiatan-kegiatan di luar kelas dan di dalam kelas.

Kegiatan diluar kelas meliputi penerimaan, pencatatan dan pembagian seragam, penjelasannya sebagai berikut:

1. Penerimaan siswa baru diantaranya menyusun panitia beserta program kerja, Pendaftaran calon siswa, Seleksi disesuaikan dengan kebutuhan jumlah tempat duduk yang tersedia di kelas, Pengumuman calon yang diterima (termasuk cadangan jika diperlukan), Registrasi (pencatatan peserta didik baru yang positif masuk)
2. Pencatatan peserta didik baru dalam buku induk dan buku klapper.

Pencatatan dilakukan guna memberikan data lengkap siswa dari mulai data diri, orang tua hingga data ekonomi yang nantinya berguna untuk menadikan

patokan sistem biaya yang ada pada sekolah serta data arsip yang harus dimiliki setiap sekolah.

3. Pembagian seragam sekolah dan tata tertib sekolah beserta sangsi.

Kegiatan-kegiatan di dalam kelas meliputi Penggolongan kelas, Interaksi belajar mengajar yang positif, Pemberian pengajaran remidi, Presensi secara kontinu, Perhatian terhadap pelaksana tata tertib kelas, Pelaksanaan jadwal pelajaran secara tertib, Pembentukan pengurus kelas.

c. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan berbasis sekolah

Manajemen pendidik memiliki dua kelompok ketenagaan di sekolah yaitu tenaga edukatif dan tenaga non edukatif dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Tenaga edukatif atau akademik, yaitu guru tetap, guru tidak tetap dan guru bantu.
2. Tenaga non edukatif atau pegawai tata usaha. Terdiri dari pegawai tetap dan pegawai honorer atau tidak tetap.

Suwandi (2016:11) dalam jurnal yang berjudul Analisis Studi Kebijakan Pengelolaan Guru SMK Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan “setiap pendidik pada setiap jenjang pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik minimum D4 atau sarjana pada bidang atau program pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diajarkan atau sesuai dengan jenjang tempat mengajar dan harus pula memiliki sertifikat profesi guru sesuai bidang yang dimiliki”. Sesuai dengan pendapat di atas hal tersebut diperlukan agar pesertadidik merasa yakin dan pihak guru merasa percaya diri bahwa ilmu yang didapatkan sudah cukup dan ditambah dengan sertifikat ahli dalam bidangnya. Guru merupakan ujung tombak awal perubahan bagi setiap siswa karena guru yang mengkondisikan, memberi dan menganalisis ilmu yang diberikan kepada siswa.

Nurkolis (2003:132) Dalam Manajemen Berbasis Sekolah, kepala sekolah mempunyai kekuasaan yang lebih besar untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adanya kepemimpinan sekolah yang kuat sehingga mampu menggerakkan dan mendayagunakan setiap sumber daya sekolah secara efektif. Kepala sekolah harus menjadi sumber inspirasi atas pembangunan dan pengembangan sekolah secara umum. Dalam MBS kepala sekolah berperan sebagai designer, motivator, fasilitator, dan liaison. Oleh karena itu pengangkatan kepala sekolah harus didasarkan atas jenjang kepangkatan dan kriteria yang sesuai di antaranya berpangkat III/C, bersertifikat kepala sekolah, minimal S1, Berusia sesuai waktu menjadi kepala sekolah.

Fachruddin (2009:145) menyatakan manajemen tenaga kependidikan mencakup: perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, kompensasi dan penilaian pegawai.

d. Manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah

Manajemen sarana dan Prasarana pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai dalam proses belajar mengajar sehingga proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana sudah seharusnya dilakukan oleh sekolah, mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan, hingga sampai pengembangan. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas, baik kecukupan, kesesuaian, maupun

kemutakhirannya, terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar. Fasilitas dalam sarana prasarana di bagi menjadi kelompok inti dan pendukung penjabarannya sebagai berikut:

1. Kelompok inti terdiri dari bangunan kelas yang berstandar, ruang guru dan karyawan yang berstandar, laboratorium atau bengkel yang memadai dan sarana olahraga yang memadai.
2. Kelompok pendukung terdiri dari bangunan perpustakaan, tempat beribadah, kantin, ruang kesenian, ruang pengembangan diri, kantin, tempat kendaraan yang memadai.

e. Manajemen pembiayaan berbasis sekolah

Manajemen pembiayaan sekolah merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional. Hal tersebut dilaksanakan dengan memberikan subsidi kepada siswa, mengatur pembiayaan secara rinci dan benar, memiliki laporan keuangan yang jelas, dan melaporkan kepada masyarakat sekolah dengan transparan.

f. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat berbasis sekolah

Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara atau sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu yang melibatkan warga sekolah dan pemangku sekolah untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publik pada khususnya sebagai kegiatan operasional sekolah agar semakin efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan.

Depdiknas (dalam Mulyasa, 2009: 128-129) mengemukakan indikator hubungan sekolah dan masyarakat dalam manajemen sekolah diantaranya peran

orang tua, pelaksanaan yang sesuai dan kemitraan sekolah, penjabarannya antara lain:

1. Sekolah berusaha melibatkan peran orang tua siswa dalam pelaksanaan program-program sekolah dan keputusan sekolah serta disampaikan secara jelas dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Masyarakat melalui komite sekolah aktif melaksanakan peran dan fungsi sesuai aturan.
3. Sekolah menjalin kerjasama dengan pihak luar berupa perusahaan, kantor, pemerintahan, dinas yang terkait guna menjalin dunia kerja (DUDI) bagi peserta didik.

Sekolah dan masyarakat dapat menambah jalinan yang harmonis juga dapat menjadikan sekolah sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan bagi masyarakat, sedangkan masyarakat dapat sebagai sumber informasi dan inspirasi bagi sekolah serta sebagai lapangan pengabdian bagi para siswa.

g. Manajemen budaya dan lingkungan berbasis sekolah

Manajemen budaya sekolah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan serta perilaku pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dan prosedur pelaksanaan.

Sekolah menetapkan pedoman tata-tertib, petunjuk, keterampilan, pemberian contoh dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik termasuk dalam hal menggunakan serta memelihara sarana prasarana pendidikan.
2. Petunjuk, peringatan, dan larangan dalam berperilaku di Sekolah, serta pemberian sanksi bagi warga yang melanggar tata tertib.

3. Pemberian keterampilan yang berguna bagi kehidupan dan pekerjaan yang mendukung dalam bidangnya.
4. Memberi contoh tentang sikap sopan, jujur, percaya diri, peduli, santun, disiplin, berkarakter, bertanggungjawab, keratif, kritis, mandiri dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hal tersebut dilakukan guna memberikan bekal kepada pesertadidik untuk menciptakan keharmonisan dan mencerminkan sikap dan perilaku yang baik setelah lulus dan mendapatkan pekerjaan.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang ditulis oleh Hanafiah, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada tahun 2015, dengan judul “Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMAN 3 Bireun Kabupaten Bireun Provinsi Aceh”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMAN 3 Bireun Kabupaten Bireun Provinsi Aceh meliputi: pertama manajemen sekolah yang terdiri dari manajemen siswa, manajemen personil, manajemen kurikulum, manajemen sarana dan prasarana, dan manajemen keuangan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat (humas). Setiap bidang manajemen yang dilaksanakan di SMAN 3 Bireun Kabupaten Bireun meliputi beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan bidang masing-masing untuk memajukan sekolah. Untuk mengetahui hasil belajar siswa, SMAN 3 Bireun Kabupaten Bireun melakukan penilaian kelas yang dapat dilakukan dengan teknik tes dan non tes. Tes berupa tertulis, lisan dan perbuatan. Non tes berupa pemberian tugas, PR portofolio, unjuk kerja dan lain-lain. Adapun mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan didasarkan pada pencapaian kriteria ketuntasan minimal dan kriteria ketentuan kelulusan. Pelaksanakan program MBS SMAN 3 Bireun

bupaten Bireun juga mengalami berbagai kendala yang sangat kompleks yang berasal dari sisea, guru dan tenaga kependidikan, lingkungan sekolah dan juga peran serta masyarakat. Namun demikian berkat kerjasama yang baik antara berbagai pihak terkait maka berbagai kendala dapat teratasi dan tidak berpengaruh besar terhadap lancarnya pelaksanaan program MBS di SMAN 3 Bireun Kabupaten Bireun Provinsi Aceh.

Penelitian yang dilakukan Tamsir (2010) tentang Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMK Negeri 2 Wonosari Gunungkidul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sekolah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menyiapkan input-input yang diperlukan untuk kesiapan pelaksanaan MBS di sekolah belum optimal, (2) transparansi manajemen telah dilaksanakan dengan baik di bidang program dan kebijakan maupun di bidang keuangan, namun secara teknis masih perlu disempurnakan. Sementara pada aspek pertanggungjawaban ketercapaian program dan pengelolaan keuangan, dalam rangka akuntabilitas telah dilakukan dengan baik dengan membuat laporan tertulis kepada komite sekolah, wali murid, dan warga sekolah, (3) kerjasama antara warga sekolah dan antara warga sekolah dengan masyarakat telah terjalin dengan baik, (4) sekolah memiliki kemandirian yang ditunjukkan dengan melakukan pengembangan struktur organisasi, mengembangkan uraian tugas personil, pengembangan kurikulum dan melaksanakan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan ICT dalam pembelajaran, (5) berkaitan dengan ketercapaian sasaran sekolah telah berhasil meningkatkan prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik, (6) masih banyak kendala yang dialami antara lain, sulit melakukan perubahan, kultur kerja keras belum sepenuhnya terbangun, kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan dan sebagian kurang peduli terhadap perubahan. Berdasarkan hasil

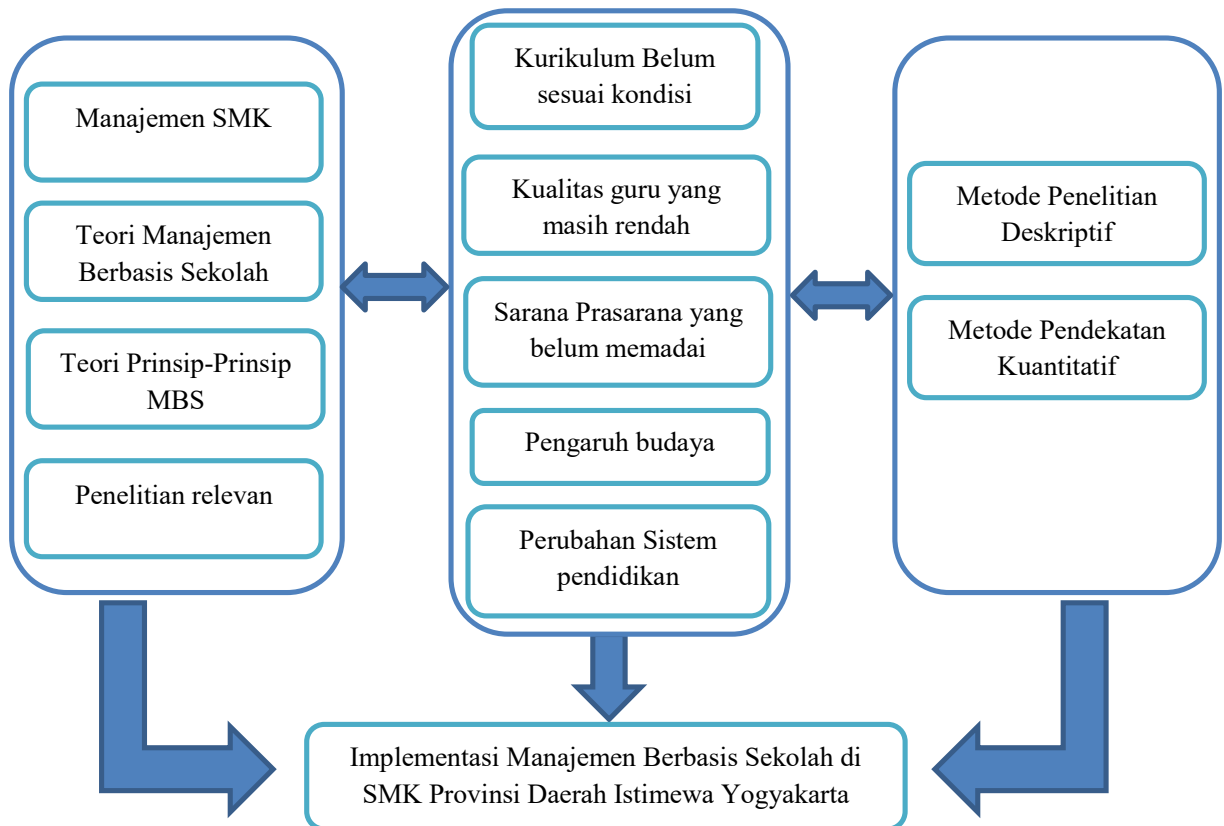
penelitian ini dan implikasinya maka disarankan kepada sekolah agar melakukan sosialisasi visi, misi, dan program lebih intensif, peningkatan peran warga sekolah, peningkatan kerjasama internal dan eksternal.

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fajar Fajrin, Jurusan Manajemen Pendidikan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018, dengan judul “Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMA YAPENDA Jakarta Utara”. Penelitian ini menjelaskan bahwa: (a) Kontribusi pelaksanaan MBS dalam kemandirian, keterbukaan manajemen sekolah, Kesiswaan, Sarana prasarana, Budaya dan lingkungan, dan profesional sumber daya manusia dalam mengelola sekolah baik. Hal ini berdasarkan skor yang didapat yaitu 76,42% artinya pelaksanaan telah berjalan baik dan mempunyai kontribusi positif dalam kemandirian, keterbukaan manajemen sekolah, dan profesional sumber daya manusia dalam mengelola sekolah. (b) Implikasi pelaksanaan MBS dalam pengambilan keputusan kependidikan dan pembiayaan berada dalam kategori baik, hal ini berdasarkan skor yang didapat yaitu 75,75%, artinya pelaksanaan MBS mempunyai implikasi dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. (c) Usaha komite sekolah dalam pelaksanaan MBS berada dalam kategori cukup, berdasarkan hasil skor yaitu 60% artinya usaha komite sekolah belum optimal dalam pelaksanaan MBS. (d) Partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pelaksanaan MBS berada dalam kategori cukup baik, berdasarkan hasil skor yang didapat yaitu 68,51% artinya orang tua dan masyarakat telah berpartisipasi dengan cukup baik dan mendukung pelaksanaan MBS. (e) Akuntabilitas dalam pelaksanaan MBS berada dalam kategori baik, hal ini berdasarkan skor yang dihasilkan yaitu 70,3% artinya akuntabilitas dalam pelaksanaan MBS terhadap stakeholder mampu dipertanggung jawabkan kepada warga sekolah.

C. Kerangka Berfikir

Manajemen berbasis sekolah memberikan wewenang lebih besar kepada sekolah untuk mengatur dan mengurus visi misi sekolah menurut prakarsa sendiri melalui sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan potensi sekolah berdasarkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat.

Penelitian Implementasi MBS di SMK Negeri dan Swasta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki tujuan mengetahui implementasi dan perbandingan MBS yang berprinsip pada Manajemen kurikulum dan pembelajaran, Manajemen peserta didik, Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, Manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah, Manajemen pembiayaan berbasis sekolah, manajemen sekolah dan masyarakat, dan Manajemen budaya dan lingkungan. Kerangka berfikir yang mendasari penelitian dapat dilihat pada gambar 2:



Gambar 2. Kerangka berfikir Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

D. Pertanyaan Penelitian

1. Berdasarkan permasalahan yang sudah diteliti pada kajian teori dan kerangka pikir diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah penerapan manajemen berbasis sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari prinsip manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah, manajemen peserta didik berbasis sekolah, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah, manajemen pembiayaan berbasis sekolah, hubungan manajemen sekolah dan masyarakat berbasis sekolah, dan manajemen budaya dan lingkungan berbasis sekolah?
 - b. Bagaimanakah perbandingan manajemen berbasis sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari prinsip manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah, manajemen peserta didik berbasis sekolah, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah, manajemen pembiayaan berbasis sekolah, hubungan manajemen sekolah dan masyarakat berbasis sekolah, dan manajemen budaya dan lingkungan berbasis sekolah?